

# TESIS

**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL  
MODERASI**

*The Influence of Government Accounting Standards and  
the Utilization of Information Technology on the Quality of  
Local Government's Financial Reports with Organizational  
Commitment as a Moderation Variable*

HELDA NELVIA



**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# TESIS

## PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

*The Influence of Government Accounting Standards and the  
Utilization of Information Technology on the Quality of Local  
Government's Financial Reports with Organizational Commitment as  
a Moderation Variable*

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**HELDA NELVIA**

**A042221002**



kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Disusun dan diajukan oleh

**HELDA NELVIA**  
**A042221002**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis  
tanggal 12 Januari 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota



Dr. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP 196604051992032003



Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si  
NIP 197709132002122002

Ketua Program Studi Magister  
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si  
NIP 197209212006042001



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.  
NIP 196402051988101001

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Helda Nelvia**  
NIM : **A042221002**  
Jurusan/Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

**PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 12 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Helda Nelvia

## PRAKATA

Segala puji dan syukur kepada Allah Tritunggal, Sang Pemilik Kehidupan ini atas kasih karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya peneliti ucapkan kepada kedua tim penasihat yang peneliti hormati, Ibu Dr. Andi Kusumawati, S.E, M.Si, Ak., CA, CRA, CRP dan Ibu Dr. Retno Fitrianti, S.E, M.Si atas waktu yang diluangkan untuk membimbing, memberi masukan, nasihat dan motivasi yang berharga kepada peneliti dalam penyelesaian tesis ini.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan Ibu Dr. Andi Ratna Sari Dewi, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.
2. Tim penguji Ibu Dr. Fauziah Umar, SE., M.Si, Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., Ak., M.Si dan Bapak Dr. Hamrullah, SE., M.Si yang telah memberikan arahan, kritik dan masukan yang berharga kepada peneliti.
3. Bapak Haris selaku Pengelola Program studi Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin atas setiap bantuan dan informasi yang diberikan.
4. Kedua orang tua yang sangat peneliti kasihi Drs. Philipus Palangda, M.Min dan Lina, B.Sc serta adik-adikku Meiltianus Nelvan, S.Pd, Giverson Dietrict, S.T,

Yustina Logen, S.KM, Marlin Eppang, S.Kep, M.Kes atas setiap doa dan semangat yang tak henti-hentinya kepada penulis.

5. Suami tercinta Daud Rantealang,S.T dan kedua anak terkasih Ashira Adonaia Rantealang dan Raphael Palangda Rantealang atas segala cinta yang menjadi sumber semangat dan sukacita bagi peneliti dalam penyelesaian tesis ini.
6. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara atas ijin yang diberikan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Bupati Morowali Utara, Kepala BKPSDM, Kepala BPKAD, Kepala Bidang Akuntansi Bapak Ferdy Tengga S.E, Bapak Agustra Kolubo,S.E, semua sahabat di bidang akuntansi BPKAD (Pak Elieser, Ibu Rima, Iva, Andri, Melly, Ryan, Trisman, Bu Bertha, alm. Ibu Fauziah, Ibu Ester, Pak Lutfi, dan Chelsi), Ibu Meitry Sari Laema, S.E, dan seluruh rekan kerja pada BPKAD Morowali Utara.
8. Kakak terkasih yang sangat peneliti hormati, Prof. Dr. Petrus Peleng Roreng, S.E, M.Si, ACPA, CRA, CRP yang dengan sabar meluangkan waktu, berbagi pengetahuan, memberi masukan, dan saran yang berharga.
9. Kak Marliyanti, Kak A. Mario, Adek Dewi Julianty, Adek Gebby Soean, Kak Denny Yulianto dan semua sahabat seperjuangan pada Magister Keuangan Daerah Angkatan 2022.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, karena itu dengan senang hati peneliti menerima setiap masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini memberi manfaat bagi setiap pihak yang menggunakannya. Tuhan Memberkati.

Makassar, 12 Januari 2024

Peneliti

Helda Nelvia

## ABSTRAK

HELDA NELVIA. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi* (dibimbing oleh Andi Kusumawati dan Retno Fitrianti).

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah baik secara langsung maupun dimoderasi oleh komitmen organisasi. Analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deksriptif dan diolah menggunakan SPSS. Pengumpulan data melalui teknik *survey* menggunakan kuesioner dengan jumlah sampel 91 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan (2) komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



## ABSTRACT

HELDA NELVIA. *The Effect of Government Accounting Standard and the Utilization of Information Technology on the Quality of Local Government's Financial Report with Organizational Commitment as a Moderation Variable* (supervised by Andi Kusumawati and Retno Fitrianti)

This research aims to describe and analyze the effect of government accounting standard and the utilization of information technology to the quality of local government's financial reports, either directly or moderated by organizational commitment. Data analysis used was quantitative approach by means of descriptive method and processed using SPSS. Data collection used was survey technique by means of questionnaire given to 91 respondents. The results show that government accounting standard and the utilization of information technology have a positive and significant effect on the quality of local government's financial report, and organizational commitment is unable to moderate the effect of government accounting standard and the use of information technology on the quality of local government's financial report.

Keywords: government accounting standards, utilization of information technology  
organizational commitment, quality of regional government's financial  
report



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian .....	11
1.4.1 Kegunaan Teoretis .....	11
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	11
1.4.3 Kegunaan Kebijakan .....	12
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	12
1.6 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep .....	14
2.1.1 Teori Penatalayanan ( <i>Stewardship Theory</i> ).....	14
2.1.2 <i>Technology Acceptance Model</i> (TAM).....	15
2.1.3 Teori Kontijensi ( <i>Contingency Theory</i> ) .....	17
2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	18
2.1.5 Standar Akuntansi Pemerintahan .....	22
2.1.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	26
2.1.7 Komitmen Organisasi.....	28
2.2 Tinjauan Empiris.....	30
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL</b> .....	<b>33</b>
3.1 Kerangka Pemikiran .....	33
3.2 Pengembangan Hipotesis .....	35
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
4.1 Rancangan Penelitian .....	41
4.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	41
4.3 Populasi .....	41
4.4 Sampel .....	42
4.5 Teknik Pengambilan Data .....	43
4.6 Jenis dan Sumber Data.....	43
4.7 Metode Pengumpulan Data .....	45

4.8 Definisi Operasional .....	46
4.8.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	46
4.8.2 Standar Akuntansi Pemerintahan .....	46
4.8.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi .....	46
4.8.4 Komitmen Organisasi .....	47
4.9 Instrumen Penelitian .....	49
4.10 Uji Instrumen Penelitian .....	50
4.10.1 Uji Validitas dan Reliabilitas .....	50
4.10.2 Uji Asumsi Klasik .....	51
4.10.2.1 Uji Normalitas .....	51
4.10.2.2 Uji Multikolinearitas .....	52
4.10.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	52
4.11 Analisis Data .....	53
4.11.1 Analisis Data Deskriptif .....	53
4.11.2 Analisis Linier Berganda .....	53
4.12 Model Hipotesis .....	53
4.12.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	54
4.12.2 Uji Parsial (uji t) .....	55
4.12.3 Uji Simultan (Uji F) .....	55
<b>BAB V HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
5.1 Deskripsi Data .....	56
5.2 Deskripsi Hasil Peneltian .....	59
5.3 Hasil Uji Kualitas Data .....	61
5.3.1 Uji Validitas .....	61
5.3.2 Uji Reliabilitas .....	62
5.4 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	63
5.4.1 Uji Normalitas .....	63
5.4.2 Uji Multikolinearitas .....	65
5.4.3 Uji Heteroskedastisitas .....	67
5.5 Uji Hipotesis .....	68
5.5.1 Penentuan Koefisien Determinasi .....	68
5.5.2 Pengujian Hipotesis $H_1$ dan $H_2$ .....	69
5.5.3 Uji Statistik F ( <i>F Test</i> ) .....	72
5.5.4 Pengujian Hipotesis $H_3$ dan $H_4$ .....	73
<b>BAB VI PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
6.1 Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	76
6.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	78
6.3 Komitmen Organisasi Tidak Mampu Memoderasi Pengaruh Pemahaman Stantar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	80
6.4 Komitmen Organisasi Tidak Mampu Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	82
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
7.1 Kesimpulan .....	85
7.2 Implikasi .....	86

7.3 Keterbatasan Penelitian .....	87
7.4 Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1 Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara .....	44
4.2 Definisi Operasional.....	47
5.1 Distribusi Kuesioner .....	57
5.2 Karakteristik Responden.....	57
5.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	60
5.4 Uji Validitas .....	61
5.5 Uji Reliabilitas .....	62
5.6 Uji Multikolinearitas .....	66
5.7 Koefisien Korelasi dan Determinasi.....	69
5.8 Hasil Uji Statistik t ( <i>t-test</i> ) Variabel Independen terhadap Variabel Dependen .....	70
5.9 Hasil Uji Statistik F ( <i>F-test</i> ) Variabel Independen terhadap Variabel Dependen .....	72
5.10 Hasil Uji Statistik F ( <i>F-test</i> ) Interaksi Variabel Terhadap Variabel Dependen .....	73
5.11 Hasil Analisis Regresi Moderasi .....	74

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
3.1 Kerangka pemikiran .....	34
3.2 Model Konseptual .....	35
5.1 Uji Normalitas Grafik Histogram .....	64
5.2 Uji Normalitas Grafik Normal Plot .....	64
5.3 Uji Heteroskedastisitas ( <i>Scatterplot</i> ) .....	67

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Peta Teori .....	100
2. Kuesioner .....	105
3. Surat Izin Penelitian .....	110
4. Tabulasi Hasil Kuesioner .....	111
5. Statistik Deskriptif .....	115
6. Uji Validitas .....	116
7. Uji Reliabilitas .....	120
8. Uji Asumsi Klasik .....	122
9. Uji Hipotesis .....	126

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pemerintahan di Indonesia diiringi dengan semakin kompleksnya tuntutan publik terhadap kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Pemerintah dituntut untuk memberi pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan (Sorusai, 2019).

Penyusunan laporan keuangan merupakan bagian terakhir namun sangat penting perannya dalam siklus pengelolaan keuangan pemerintah. Laporan keuangan merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangan pemerintah kepada publik. Laporan keuangan memiliki fungsi sebagai alat ukur untuk dapat melihat apakah suatu pemerintahan telah terlaksana dengan baik atau tidak. Laporan keuangan akan memberi jaminan kepada penggunanya bahwa pengelolaan atas sumber daya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat menjadi sarana dalam mengevaluasi kinerja organisasi (Sujarweni, 2021). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna karena banyak pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan (PP No 71 Tahun 2010).

Sebagaimana dikemukakan dalam teori *stewardship* bahwa *steward* dalam menjalankan manajemen organisasi akan mengesampingkan kepentingannya untuk kepentingan *principal* yang mengharapkan adanya tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan sumber daya (Raharjo, 2007). Pertanggungjawaban *steward* terhadap pengelolaan yang dilakukannya dinyatakan dalam bentuk

laporan keuangan yang menggambarkan keseluruhan penggunaan keuangan dan sumber daya selama periode anggaran untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diharapkan oleh *principal*. Untuk meyakinkan kualitas laporan keuangan tersebut maka pihak eksternal dan independen akan melaksanakan audit terhadap laporan keuangan yang disajikan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah terkait dengan transparansi informasi mengenai keuangan pemerintah dan bukan hanya sekedar penyajian angka. Laporan keuangan yang berkualitas baik menunjukkan bahwa informasi yang termuat di dalamnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mengakibatkan rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah terkait pengelolaan keuangan. Kualitas laporan keuangan yang buruk dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan dana publik, pihak investor tidak berani menanamkan modal pada pemerintah, donatur dapat mengurangi bahkan menghentikan bantuan, laporan keuangan tidak dapat digunakan untuk mengukur kinerja bahkan tidak dapat diaudit (Sujarweni, 2021). Selain itu apabila laporan keuangan yang disajikan tidak berkualitas baik maka informasi yang disajikan tidak dapat digunakan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan (Firmansyah et al., 2022).

Salah satu indikator yang menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tiap tahun melalui opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang diberikan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat. Ketika BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menandakan bahwa

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (BPK, 2013).

Selain memberi citra positif bagi pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan, opini Wajar Tanpa Pengecualian memberi peluang bagi daerah untuk memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) yang diperuntukkan bagi daerah yang memenuhi kriteria tertentu di bidang pengelolaan keuangan. Dana Insentif Daerah ditujukan untuk mendukung percepatan perekonomian di daerah melalui dukungan usaha mikro kecil dan menengah, penurunan inflasi, dan percepatan penyerapan belanja daerah (PMK No 140 Tahun 2022).

Laporan keuangan yang berkualitas tercermin dari kesesuaian antara informasi yang termuat dalam laporan dengan standar akuntansi yang berlaku (Firmansyah et al., 2022). Dalam lingkup pemerintahan, hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman aparaturnya dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada laporan keuangan dimaksudkan untuk memberi manfaat yang lebih baik bagi para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah di pusat maupun daerah. SAP menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat memberi informasi yang andal kepada pihak pengguna. Selain itu juga SAP menjadi acuan dalam pemeriksaan oleh BPK RI terhadap laporan yang disusun oleh pemerintah daerah, apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian opini dan catatan BPK RI terhadap LKPD.

Merujuk pada teori penatalayanan (*stewardship theory*), sebagai bentuk usaha pemerintah untuk memberi pelayanan terbaik bagi pengguna laporan

keuangan maka Laporan tersebut harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi berterima umum yang dalam lingkup pemerintahan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar ini merupakan satu-satunya standar di Indonesia yang digunakan baik dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah maupun pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK-RI sebagai lembaga eksternal dan independen.

Sejumlah peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ardianto dan Eforis (2019) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Ardiyanti (2018), Goo et al. (2019), Darmawan (2019), Yanti *et al.* (2020), dan Jauhari et al. (2021). Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Nurlis (2018) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lain yang juga berperan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi itu sendiri merupakan teknologi komputerisasi baik berupa *hardware* maupun *software* yang berfungsi dalam pengolahan data dan pemrosesan informasi yang dipadukan dengan teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi (Martin, 1999). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

*Technology Acceptance Model* (TAM) menjadi teori dasar yang menjelaskan bagaimana seseorang meyakini penggunaan teknologi informasi dapat mempengaruhi kinerjanya. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam mengadopsi suatu teknologi dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Teori ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan teknologi informasi dengan memperhatikan faktor-faktor TAM sehingga organisasi dapat merancang teknologi seperti apa yang terbaik dalam meningkatkan produktivitas pengguna dalam melaksanakan tugasnya (Wicaksono, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu dengan hasil yang bervariasi telah dilakukan mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Safiri dan Zulkarnain (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lain dengan hasil yang sama dilakukan oleh Imelia *et al.* (2021), Modo *et al.* (2016), dan Purba dan Purba (2023). Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Surastiani dan Handayani (2015), Aulia dan Ardiyanti (2018), Goo *et al.* (2019), serta Purba *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor diatas. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor yang bersifat kondisional yang dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Faktor-faktor tersebut perlu diidentifikasi dalam rangka

rekonsiliasi ketidakkonsistenan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kontijensi (Sorusai, 2019).

Komitmen organisasi dalam pemerintahan menunjukkan perilaku (*behavior*) Aparatur Sipil Negara dalam keterlibatan dan keterikatannya pada OPD dimana ASN tersebut bertugas. Apabila pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi memberi dukungan positif yang sejalan dengan visi dan misi organisasi dalam bentuk loyalitas, keterlibatan, usaha dan tanggung jawab penuh maka akan mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut. Dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan, komitmen organisasi menunjukkan tanggung jawab kerja, loyalitas aktif, dan transparansi pengelola keuangan dalam usaha untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Jika ASN merasakan keterikatan dengan nilai-nilai yang dianut organisasi maka dia dengan senang hati akan bekerja dengan baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan organisasi serta termotivasi untuk melaporkan semua aktivitas yang akuntabel kepada publik termasuk akuntabilitas keuangan melalui laporan keuangan pemerintah (Eristanti *et al*, 2019).

Komitmen organisasi dalam hubungannya sebagai variabel moderasi terhadap kualitas Laporan Keuangan telah banyak diteliti. Penelitian Pramita (2010) dan Tambingon *et al.* (2018) menunjukkan kemampuan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Namun bertentangan dengan itu, penelitian oleh Ratifah dan Ridwan (2012), Siwambudi *et al.* (2017), dan Ikrar (2018) justru menunjukkan ketidakmampuan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sanjaya *et al.* (2017), Nasution (2017), dan Manullang (2016) menyatakan bahwa SAP yang dimoderasi oleh komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini berlawanan

dengan penelitian Wulandari (2018) dan Sorousai (2019) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian oleh Andelina dan Hariyanto (2017), Jumardi et al. (2022) menunjukkan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Tidak sejalan dengan itu, penelitian Satriawan dan Dewi (2020), Kahar et al. (2022) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti kembali sehubungan dengan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mengenai kemampuan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Satriawan dan Dewi (2020). Hasil penelitian Satriawan dan Dewi (2020) menunjukkan bahwa pengendalian internal dan kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sementara pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh pengendalian internal dan kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan tetapi tidak mampu memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi pada laporan keuangan. Ketertarikan untuk melakukan penelitian kembali didasarkan pada pemikiran bahwa SAP dalam penelitian rujukan tidak digunakan sebagai variabel, sementara SAP merupakan standar atau aturan yang harus menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan tidak ada standar lain. Pemahaman mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Oleh karena itu

penelitian ini menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai variabel independen.

Kabupaten Morowali Utara sebagai kabupaten termuda di Provinsi Sulawesi Tengah telah menjalankan fungsinya sejak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah. Sejak berdirinya Kabupaten Morowali Utara hingga sekarang, daerah ini mulai menunjukkan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuktikan oleh tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut selama empat tahun terakhir (tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022), setelah 3 (tiga) kali memperoleh opini *disclaimer* (tahun 2014, 2015, 2016), dan 2 (dua) kali memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk LKPD tahun 2017 dan tahun 2018.

Opini BPK-RI terhadap LKPD merupakan hasil dari pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Sementara itu pada pelaksanaan penyusunan laporan pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, LKPD tidak hanya dilaporkan secara tahunan melainkan juga secara bulanan, triwulanan dan semesteran kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Seperti termuat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa salah satu prinsip akuntansi pemerintahan yaitu prinsip periodisitas dimana pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode yang digunakan adalah tahunan, bulanan, triwulanan dan semesteran.

Dalam prakteknya seringkali terjadi penyajian laporan bulanan/triwulan/semesteran yang melewati batas waktu penyampaian yang

ditentukan. Seperti yang terjadi pada beberapa bulan penyampaian Laporan Keuangan pada Tahun 2022 pada aplikasi SINERGI yang seharusnya dilaporkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, namun seringkali harus mundur sehari atau lebih. Menurut Kasubid Bina Akuntansi BPKAD Kabupaten Morowali Utara, hal ini terjadi karena keterlambatan beberapa Organisasi Perangkat Daerah dalam menyampaikan pertanggungjawaban bulanan terkait pendapatan dan belanja sehingga berdampak pada tidak tepatnya waktu penyampaian laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran oleh bidang Akuntansi kepada pihak yang membutuhkan, khususnya Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Apabila Bidang Akuntansi tetap menyampaikan laporan keuangan tersebut tepat waktu, maka keandalan laporan tersebut akan mengalami penurunan karena beberapa *item* pendapatan ataupun belanja baru terinput setelah laporan keuangan telah disajikan kepada pihak pengguna (Dirjen Perbendaharaan/BPKAD Provinsi/Kemendagri/Kemenkeu).

Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti terkait dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam PP No. 71 Tahun 2010 yaitu tepat waktu dimana laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang disajikan tepat waktu karena akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Selain itu karakteristik andal yang salah satu bagiannya adalah menyajikan informasi yang sebenarnya terjadi dalam periode yang bersangkutan juga sangat penting untuk diperhatikan. Terjadinya penyampaian laporan keuangan yang melewati batas waktu ataupun disampaikan tepat waktu namun tidak memuat sejumlah transaksi yang seharusnya dimuat dalam periode tersebut akan menurunkan kualitas laporan keuangan khususnya laporan keuangan bulanan, triwulanan, maupun semesteran.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan kondisi yang terjadi pada Kabupaten Morowali Utara, ketidakkonsistenan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu serta perbedaan hasil moderasi pada variabel komitmen organisasi menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara?
- 2) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara?
- 3) Apakah komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara?
- 4) Apakah komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

- 2) Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
- 3) Untuk menganalisis kemampuan komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
- 4) Untuk menganalisis kemampuan komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis kepada institusi pemerintah, akademisi, peneliti, maupun masyarakat secara umum. Adapun kegunaan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi mengenai implementasi dan pengembangan teori untuk menjelaskan fungsi pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik yaitu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi pemerintah daerah khususnya pihak pengelola keuangan daerah dalam hal penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan didukung oleh komitmen organisasi. Selain itu juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi peneliti lain untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **1.4.3 Kegunaan Kebijakan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak penentu kebijakan dan pengambil keputusan pada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Morowali Utara dalam mengambil kebijakan terkait penyusunan laporan keuangan sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas secara konsisten.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada 38 OPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan mengangkat soal Standar Akuntansi Pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi yang didukung oleh komitmen organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian disusun berdasarkan pedoman penulisan tesis dan disertasi Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin 2013 yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, berisi pengantar menuju penelitian yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi uraian tentang teori yang digunakan untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai teori yang menjadi pusat dari

penelitian, konsep, pemikiran dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab III Kerangka Konseptual yang berisi kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan rumusan logis dari kajian teoretis dan empiris, dan berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dibangun kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep yang diteliti. Hipotesis adalah hubungan logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

Bab IV Metode Penelitian, berisi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan validitas temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab V Hasil Penelitian, berisi deskripsi data yang dijelaskan berdasarkan basis statistik deskriptif dan deskripsi hasil penelitian yang memuat deskripsi sistematis tentang data dan temuan yang diperoleh.

Bab VI Pembahasan, berisi pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang sudah mapan, memodifikasi teori yang telah ada atau menyusun teori baru.

Bab VII Penutup, berisi kesimpulan yang merangkum semua hasil penelitian, implikasi hasil penelitian berupa implikasi teoretis dan praktis, keterbatasan penelitian yang menguraikan hal-hal yang membatasi penelitian, dan saran yang dibuat berdasarkan hasil penelitian dan pertimbangan peneliti yang ditujukan kepada peneliti berikutnya yang akan melanjutkan ataupun mengembangkan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

##### 2.1.1 Teori Penatalayanan (*Stewardship Theory*)

Teori penatalayanan (*Stewardship Theory*) merupakan teori yang muncul sebagai alternatif dari teori agensi yang memberi konsep berlawanan dimana teori penatalayanan menyatakan bahwa *steward* termotivasi untuk melakukan yang terbaik bagi kepentingan *principal* dengan mengesampingkan tujuan pribadinya. Teori ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kepuasan *principal* dengan kesuksesan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991).

Teori *stewardship* dalam konsepnya pada lingkup pemerintah daerah menggambarkan bahwa pemerintah sebagai *steward* akan bertindak untuk kepentingan masyarakat (publik) sebagai *principal*. Tanggung jawab *steward* kepada *principal* dilaksanakan dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya publik. Penyusunan dan pelaporan aktivitas pengelolaan sumber daya publik dinyatakan melalui Laporan Keuangan yang berkualitas yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang berkualitas tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban dan pelayanan kepada masyarakat selaku *principal*. Dalam hal ini pemerintah termotivasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi demi tercapainya kepuasan masyarakat (Syafaah dan Baroroh, 2023).

Dalam penelitian ini, teori *stewardship* terkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam hal penyajian laporan keuangan yang berkualitas terhadap pihak pengguna dengan memahami mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dan memanfaatkan teknologi informasi.

### 2.1.2 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Salah satu teori yang umum digunakan dan dianggap sangat berpengaruh untuk menjelaskan penerimaan seseorang terhadap suatu teknologi dikenal dengan Model Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model/TAM*). Teori ini dikembangkan oleh Davis et al. (1989) dengan berdasar pada model Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action/TRA*). Model TRA menunjukkan bahwa *attitude* seseorang (misalnya sikap terhadap belajar) digabungkan dengan *subjective norms* (norma-norma subjektif seperti kepercayaan-kepercayaan orang lain terhadap belajar) akan berpengaruh terhadap niat terhadap belajar dan akan menentukan apakah orang tersebut akan belajar atau tidak (*behavioral intention*).

TAM yang belum dimodifikasi menggunakan lima konstruk utama (Jogiyanto, 2007) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Perceived Usefulness* (kegunaan persepsian).

*Perceived Usefulness* menunjukkan persepsi pengguna tentang kegunaan teknologi, sejauh mana penggunaan ini diyakini akan meningkatkan kinerja seseorang (Davis, 1989). Apabila seseorang percaya bahwa sistem informasi tersebut bermanfaat maka orang tersebut akan menggunakannya (Jogiyanto, 2007).

2. *Perceived easy of use* (Persepsi kemudahan penggunaan)

*Perceived easy of use* semula didefinisikan oleh Davis et al. (1989) dalam Warkentin et al. (2010) sebagai sejauh mana seseorang mempercayai bahwa penggunaan sistem tertentu akan bebas dari usaha atau penggunaannya mudah. Relevansi ini penting untuk diperhatikan dalam penggunaannya karena karakteristik pengguna yang beragam (Belanche et al., 2012). *Perceived easy of use* menunjukkan persepsi mengenai kemudahan penggunaan teknologi.

3. *Attitude towards Behavior* (Sikap terhadap Perilaku)

*Attitude towards Behavior* didefinisikan oleh Davis et al. (1989) sebagai perasaan dari seseorang baik positif ataupun negatif dalam melakukan suatu perilaku tertentu. Jogiyanto (2007) mendefinisikan *Attitude towards Behavior* sebagai evaluasi pengguna mengenai ketertarikannya untuk menggunakan suatu sistem.

4. *Behavioral Intention* (Niat Perilaku)

*Behavioral Intention* (Niat Perilaku) menunjukkan keinginan seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu (Jogiyanto, 2007).

5. *Behavior* (Perilaku)

*Behavior* (Perilaku) menurut Jogiyanto (2007) yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana dalam hubungannya dengan penggunaan sistem teknologi informasi, hal ini menunjukkan penggunaan teknologi yang sesungguhnya (*actual use*).

Penelitian mengenai keakuratan TAM telah banyak dilakukan oleh peneliti di berbagai negara. Salah satunya dilakukan oleh Belanche et al. (2012) yang meneliti mengenai kedua faktor penentu penggunaan teknologi informasi (*perceived usefulness dan perceived easy of use*) dalam hubungannya dengan layanan elektronik oleh pemerintah. Belanche et al. (2012) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa penelitian layanan online yang dilakukan oleh peneliti hendaknya mendalami mekanisme TAM. Layanan elektronik pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang karakteristik lingkungan online dengan menggunakan sistem manajemen layanan yang berkualitas dan dapat dipercaya (Corbitt et al., 2003). Sistem layanan tersebut kemudian dikombinasikan dengan teknik lain yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai layanan pemerintah berbasis online (Belanche et al., 2012).

Rahmawati dan Narsa (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perkembangan teknologi multimedia banyak berpengaruh terhadap cara pandang seseorang dalam memperoleh dan mengolah informasi. Hal ini tidak terkecuali pada sektor pemerintahan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dewasa ini menuntut reaksi pemerintah dalam memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam pengolahan data di hampir semua aspek. *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam penelitian ini digunakan untuk melihat sejauh mana pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh dalam menghasilkan suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas.

### **2.1.3 Teori Kontijensi (*Contingency Theory*)**

Teori kontijensi menyatakan bahwa tidak ada suatu cara terbaik yang dapat diterapkan secara universal dan efektif penggunaannya untuk semua situasi, melainkan hanya sesuai pada konteks atau kondisi tertentu (Narsa, 2008). Berdasarkan pendekatan kontijensi, ada kemungkinan terdapat variabel lain sebagai penentu yang saling berinteraksi dan selaras dengan kondisi tertentu yang dihadapi manajemen dalam memaksimalkan pencapaian tujuan (Otley, 2016).

Anthony dan Govindarajan (2004) mengemukakan bahwa struktur organisasi dan proses kontrol dipengaruhi oleh faktor-faktor kontijensi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Fisher (1998) juga menyatakan bahwa sistem kontrol akuntansi dipengaruhi oleh variabel-variabel kontijensi yaitu ketidakpastian, teknologi, industri, karakteristik perusahaan dan unit bisnis, strategi kompetitif dan faktor-faktor lain yang dapat diobservasi.

Sehubungan dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu dengan hasil yang berbeda dan tidak konsisten maka untuk merekonsiliasi temuan dari penelitian yang bertentangan tersebut, digunakan pendekatan kontijensi

(Suarmika et al, 2016). Tujuan pendekatan kontijensi adalah untuk mengidentifikasi variabel kontijensi yang dapat mempengaruhi kinerja. Pendekatan kontijensi menunjukkan kemungkinan adanya variabel yang bertindak sebagai variabel intervening ataupun variabel moderating (Sorusai, 2019). Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah juga menunjukkan hasil yang berbeda atau tidak konsisten mengenai hubungan variabel independen dan variabel dependen, sehingga dalam penelitian ini *contingency theory* dijelaskan oleh variabel moderasi yaitu komitmen organisasi. Penggunaan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi memungkinkan pengaruh SAP dan pemanfaatan teknologi informasi dapat diperkuat atau diperlemah pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

#### **2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, yang dimaksud dengan laporan keuangan yaitu laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 71 Tahun 2010).

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian informasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi (kenaikan atau penurunan) keuangan entitas pelaporan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif yang berarti bahwa laporan keuangan menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh

dan digunakan sesuai dengan anggaran dan ketentuan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, kadar, derajat atau taraf, mutu. Berkualitas diartikan sebagai mempunyai kualitas atau bermutu baik. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang merupakan syarat laporan keuangan pemerintah disebut berkualitas, yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila memuat informasi yang berpengaruh terhadap keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan melakukan koreksi terhadap hasil evaluasi tersebut serta memprediksi masa depan. Informasi laporan keuangan yang relevan bermakna sebagai berikut:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi peristiwa yang terjadi di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi yang disajikan dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan kejadian masa lalu dan masa sekarang.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan dengan tepat waktu untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin mengenai semua informasi akuntansi yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang dapat menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap transaksi secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan keadaan sebenarnya dari setiap transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji kebenarannya bahkan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.

c. Netralitas

Informasi diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang dipahami oleh para pengguna.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas terlihat dari isi laporan mengenai transaksi keuangan pemerintah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan mampu menjadi sumber informasi mengenai pengelolaan keuangan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **2.1.7 Standar Akuntansi Pemerintahan**

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dan disusun dalam bentuk PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan). Menurut Udiyanti et al. (2014) Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pedoman yang digunakan untuk menyatukan persepsi antara penyusun laporan, pengguna laporan, dan auditor. Menurut Yanti et al. (2020), SAP merupakan pedoman dan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang diterapkan pada pemerintah pusat dan departemennya maupun daerah dan dinas-dinasnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual didefinisikan dalam PP No.71 Tahun 2010 sebagai SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Komponen-komponen Laporan Keuangan yang termuat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam lingkup pemerintahan pusat maupun daerah, penerapan SAP diterapkan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan laporan keuangan. Keberadaan SAP sebagai satu-satunya acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah menjadi tolak ukur bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan dengan kualitas yang memenuhi empat karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Terdapat 8 (delapan) prinsip yang menjadi ketentuan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang harus dipahami dan ditaati dalam penyajian laporan keuangan. Kedelapan prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan

nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada RKUD atau oleh entitas pelaporan. Belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

#### 2. Prinsip nilai historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

#### 3. Prinsip realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA merupakan laporan yang wajib disusun maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

#### 4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan bukan hanya aspek formalitas melainkan

sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. Prinsip periodisitas (*periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun dianjurkan juga periode bulanan, triwulanan dan semesteran.

6. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar depan (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

### **2.1.8 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pengertian teknologi informasi menurut Haag dan Keen (1996) adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Sedangkan menurut Martin (1999) teknologi informasi adalah teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarkan informasi. Berdasarkan definisi dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan kombinasi antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang membantu memberi kemudahan bagi manusia dalam mengelola dan menyebarkan informasi.

Sutarman (2009) mengemukakan bahwa indikator teknologi informasi terdiri dari tiga komponen utama yaitu *hardware* (perangkat keras), *software* (perangkat lunak) dan jaringan komunikasi. *Hardware* merupakan perangkat fisik dalam teknologi informasi seperti monitor komputer, *keyboard*, *mouse*, *printer*, *hardisk*, kabel jaringan, CPU dll. *Software* merupakan program yang disusun untuk mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh komputer yang terdiri dari perangkat lunak sistem seperti *windows*, *linux* dll; perangkat lunak bahasa pemrograman

seperti *visual basic*, *Delphi*, dll, dan perangkat lunak aplikasi seperti *Microsoft Office*, *windows media player*, dll. Jaringan komunikasi merupakan sistem yang saling terhubung yang memungkinkan satu sumber digunakan bersama pada komputer yang berbeda.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip *good governance*, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan dalam proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Widarsono dan Lediana (2013) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan pemerintah semua sudah dipermudah dengan adanya teknologi berbasis digital yang diterapkan untuk menghasilkan informasi yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pernyataan ini didukung oleh kondisi yang umum terlihat pada institusi pemerintahan daerah dimana pengelolaan keuangan telah menggunakan aplikasi *online* yang tujuan penggunaannya adalah untuk mempermudah pengelolaan data dan transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan sistem *online* melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Selain SIPD yang merupakan produk yang diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sejumlah pemerintah daerah juga menggunakan

aplikasi lainnya yang dikolaborasikan penggunaannya dengan SIPD, seperti SIMDA *Next G* atau dikenal juga dengan FMIS (*Financial Management Information System*) yang merupakan aplikasi online yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aplikasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan sistem berbasis online ini dalam hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi terkomputerisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai informasi keuangan yang dihasilkan dan laporan keuangan tersaji tepat waktu.

#### **2.1.9 Komitmen Organisasi**

Sejumlah ahli dan peneliti memberikan definisi tentang komitmen organisasi dalam penjelasan masing-masing. Steers dan Porter (1983) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu sikap dimana individu mengidentifikasi dirinya terhadap tujuan dan harapan organisasi dimana ia bekerja dan berusaha mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Mathis dan Jackson (2000) memberi definisi mengenai komitmen organisasi sebagai suatu tingkatan dimana karyawan mempercayai dan menerima setiap tujuan organisasi sehingga tidak akan meninggalkan organisasi tersebut. Suartana (2010) dalam Mada et al. (2017) menyatakan komitmen organisasi berhubungan dengan komitmen seseorang terhadap tujuan organisasi yang akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi berhubungan dengan rasa memiliki seseorang terhadap organisasi yang akan berdampak pada kinerjanya untuk tetap bertahan pada organisasi dan bersedia melakukan upaya untuk mencapai tujuan

organisasi. Komitmen organisasi mendorong seseorang untuk setia terhadap organisasi dan bekerja dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk mendukung terwujudnya tujuan yang ingin dicapai organisasi tanpa paksaan.

Dalam institusi pemerintah, komitmen organisasi ditunjukkan oleh loyalitas Aparatur Sipil Negara dalam bekerja dan mendukung visi misi pemerintah. Dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan, komitmen organisasi menunjukkan tanggung jawab kerja, loyalitas aktif, dan transparansi pengelola keuangan dalam usaha untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Jika ASN merasakan keterikatan dengan nilai-nilai yang dianut organisasi dimana dia bekerja maka ASN tersebut dengan senang hati akan bekerja dan bertanggung jawab dalam menjalankan organisasi serta termotivasi untuk melaporkan semua aktivitas yang akuntabel kepada publik termasuk akuntabilitas keuangan melalui laporan keuangan pemerintah (Eristanti *et al*, 2019).

Komitmen organisasi memiliki beberapa bentuk yang berbeda dengan penjelasannya masing-masing. Menurut Allen dan Meyer (1997) komitmen organisasi terdiri atas 3 (tiga) dimensi yaitu:

1. *Affective Commitment* (Komitmen Afeksi)

Para anggota organisasi memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan dalam organisasi karena menganut nilai dan tujuan yang sama dengan organisasi. Mereka yang memiliki komitmen afeksi yang tinggi berusaha untuk berperan penuh dalam mencapai tujuan organisasi dan kemajuan organisasi agar tetap bertahan dalam organisasi.

2. *Continuance Commitment* (Komitmen Berkelanjutan)

Anggota organisasi mempertimbangkan nilai ekonomi yang akan menguntungkan apabila ia bekerja dalam organisasi dan mendorongnya untuk tetap bertahan dalam organisasi daripada meninggalkannya.

### 3. *Normative Commitment* (Komitmen Normatif)

Anggota organisasi yang memiliki komitmen normatif yang tinggi akan berusaha untuk bertahan karena merasa harus melakukan sesuatu untuk organisasi sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai anggota organisasi.

## 2.3 Tinjauan Empiris

Darmawan (2019) dalam penelitiannya pada SKPD di Bandung menunjukkan hasil bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Pemahaman yang benar terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penerapannya dapat mendukung upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nkundabanyanga et al. (2013) terhadap kualitas laporan organisasi pemerintah di Uganda meyakini bahwa peningkatan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah dan peraturan yang berlaku akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah akan meningkatkan akuntabilitas publik kepada *stakeholders* yang dukungannya sangat penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Hasil penelitian lainnya di Indonesia yang menunjukkan pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Sudiarianti (2015), Susanti dan Andayani (2019) dan Sorousai (2019), yang menunjukkan pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan pada kualitas Laporan Keuangan. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Harun (2021) pada SKPD di Kota Ternate menunjukkan tidak adanya pengaruh SAP pada kualitas informasi Laporan Keuangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap penerapan SAP dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Satriawan dan Dewi (2020) pada Pemerintah Kabupaten menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Beberapa faktor yang dianggap menjadi penghambat sehingga teknologi informasi tidak mampu menjalankan peran secara optimal dalam mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas dalam penelitian ini antara lain faktor kerusakan atau gangguan jaringan, pengaruh *hardware dan software*, dan kemampuan sumber daya dalam mengaplikasikan teknologi yang menghambat proses penyusunan laporan. Komitmen organisasi tidak mampu memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengaruhnya terhadap kualitas Laporan Keuangan.

Sejumlah penelitian lainnya mengenai pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan antara lain dikemukakan oleh Nurilah dan Muid (2014) bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi membantu percepatan proses olah data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Purba dan Purba (2023) meneliti sejumlah faktor yang mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dimana salah satunya adalah dampak penggunaan teknologi informasi terhadap mutu informasi keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap mutu informasi keuangan pemerintah daerah. Pemerintah harus melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembentukan informasi finansial daerah kepada pihak pengguna laporan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Penelitian ini senada dengan penelitian Indriasari dan Ertambang (2008), Darwanis (2009), Haza (2015), Wijayanti (2017), serta Nadir dan Hasyim (2017) bahwa teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, namun penelitian Gasperz (2019)

mengemukakan hasil yang berbeda bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sejumlah penelitian yang menggunakan komitmen organisasi sebagai pemoderasi, antara lain telah dilakukan oleh Pasolo et al. (2023) yang menyatakan bahwa secara tidak langsung penerapan SAP yang dimoderasi oleh komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Jika SAP diterapkan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang terkandung di dalamnya dan didukung oleh kinerja pegawai yang loyal maka akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Zeyn (2011), Sanjaya (2017) dan Sutisman et al. (2021). Namun hasil penelitian Wulandari (2018) dan Sorusai (2019) menyatakan sebaliknya bahwa penerapan SAP dengan dimoderasi oleh komitmen organisasi tidak mampu meningkatkan kualitas LKPD.

Penelitian mengenai komitmen organisasi sebagai pemoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap laporan keuangan telah dilakukan oleh Jumardi et. al (2022) menyatakan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Alminanda (2018), Madrawati (2022), Satriawan dan Dewi (2020) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan.

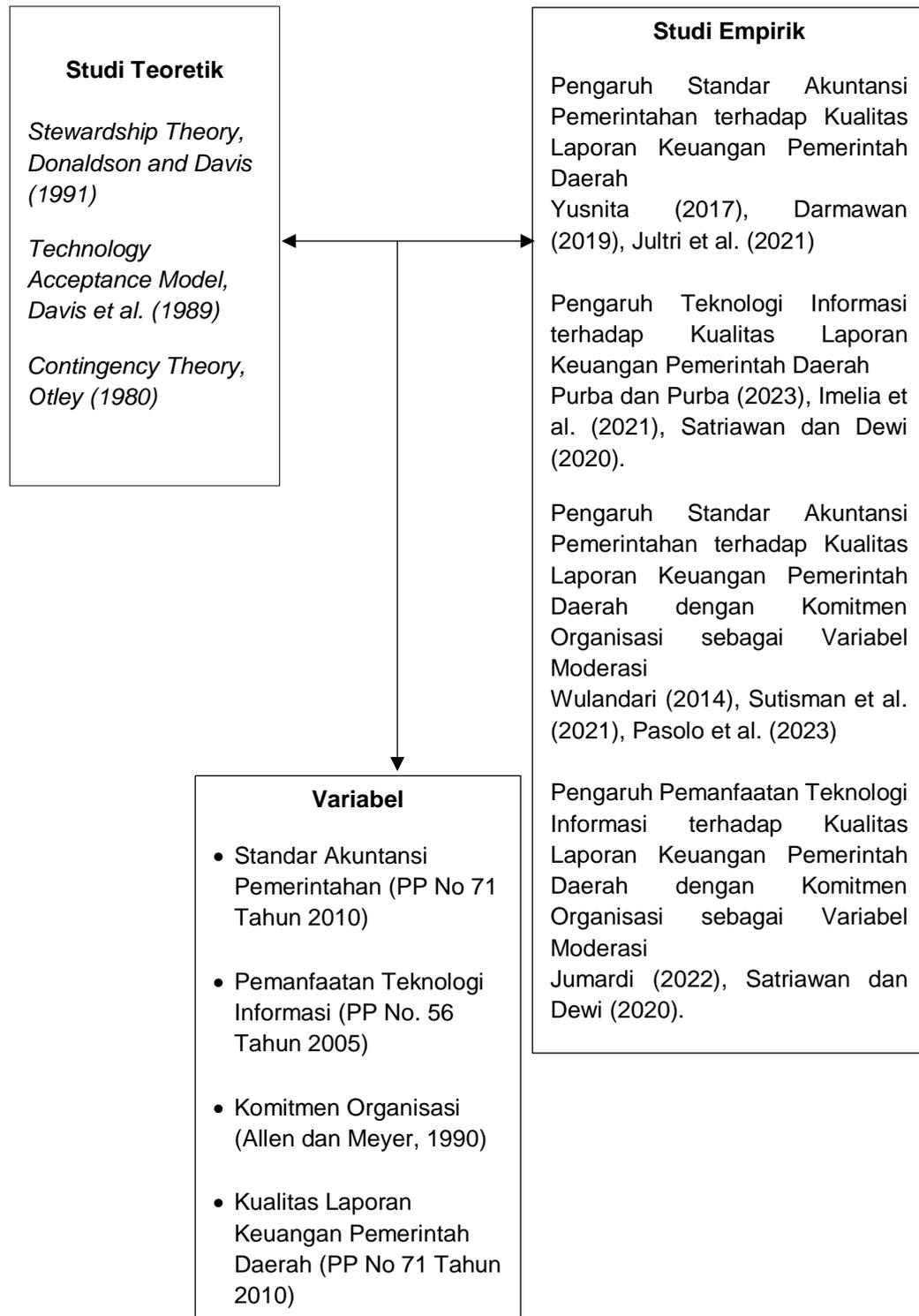
## BAB III

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### 3.1 Kerangka Pemikiran

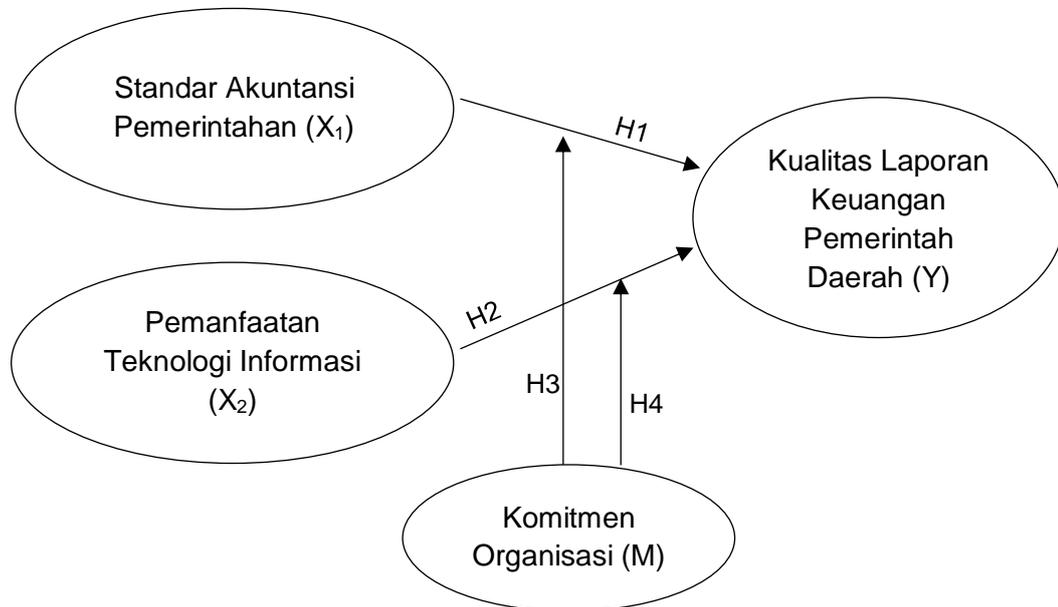
Penelitian ini akan menganalisa pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan variabel moderasi yaitu Komitmen Organisasi dengan bertitik tolak pada Teori Penatalayanan (*Stewardship Theory*), *Contingency Theory*, dan *Technology Acceptance Model* (TAM) sebagai *grand theory*. Penelitian-penelitian terdahulu dengan hasil yang bervariasi juga menjadi acuan dalam pengembangan kerangka pikir dalam penelitian ini.

Gambaran studi teoretik dan studi empirik dalam penelitian menghasilkan variabel-variabel penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu variabel bebas (independen) yang terdiri dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ( $X_1$ ) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_2$ ), variabel terikat (dependen) yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( $Y$ ), serta variabel moderasi yaitu komitmen organisasi ( $M$ ). Kerangka pemikiran dan model penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran maka model konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Model konseptual

## 3.2 Pengembangan Hipotesis

### 3.2.1 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

*Stewardship Theory* menggambarkan bahwa pemerintah sebagai *steward* akan bertindak untuk kepentingan masyarakat (publik) sebagai *principal*. Tanggung jawab *steward* kepada *principal* dilaksanakan dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya publik. Pertanggungjawaban tersebut dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemahaman dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai satu-satunya standar yang digunakan dalam penyusunan LKPD yang di dalamnya memuat penjelasan mengenai karakteristik kualitatif

laporan keuangan menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya pemahaman yang benar dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, akan mendukung terciptanya laporan yang berkualitas sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh penggunanya.

Dalam artikel yang berjudul “*Cautiousness on Convergence of Accounting Standards across Countries*”, Angeloni (2016), melihat perbandingan penggunaan Standar Akuntansi yang diterapkan di berbagai negara. Mengingat banyaknya standar akuntansi yang diterapkan di berbagai negara maka usaha untuk menemukan standar yang lebih tepat diterapkan dalam suatu negara masih terus diteliti. Namun demikian dalam pemerintahan di Indonesia, SAP menjadi satu-satunya standar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang otomatis menjadi acuan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dengan berpedoman pada SAP dalam penyusunan maupun *auditing* dapat meyakinkan pengguna akan keandalan laporan keuangan.

Beberapa penelitian terdahulu seperti yang telah dilakukan oleh Yusnita (2017) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini didukung oleh penelitian Darmawan (2019) dan Jultri et al. (2021). Penelitian dengan hasil yang berbeda dilakukan oleh Harun (2021) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu terlihat adanya hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi faktor penting dalam menghasilkan

laporan keuangan yang berkualitas. Dengan memperhatikan kerangka pemikiran dan model konseptual, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **3.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Teori Model Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model/TAM*) yang dikembangkan oleh Davis et al. (1989) menjadi salah satu teori yang populer dan umum digunakan dalam menjelaskan penerimaan individu terhadap pemanfaatan suatu teknologi informasi. Model ini menggunakan lima konstruk utama yaitu *perceived usefulness*, *perceived easy of use*, *attitude towards behavior*, *behavioral intention* dan *behavior* (perilaku). Dalam era teknologi, pemanfaatan teknologi informasi diterapkan dalam hampir semua lini termasuk pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan mulai dari penganggaran hingga penyusunan laporan keuangan telah dilakukan secara komputerisasi. Hal ini memerlukan penerimaan pengguna dalam hal kemudahan dan kegunaan teknologi sehingga dapat memanfaatkan teknologi tersebut dalam mendukung kinerja, termasuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Zekos (2003) mengemukakan bahwa dalam era ekonomi digital, kemajuan di bidang teknologi informasi menjadi kekuatan pendorong di balik percepatan produktivitas suatu organisasi. Komputer, internet dan teknologi komunikasi memungkinkan suatu organisasi mengalokasikan aktivitasnya termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan dengan hasil yang beragam. Purba dan Purba (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah. Hasil ini didukung oleh penelitian Lebang (2016), Sari dan Witono (2014), Ariesta (2013). Hasil sebaliknya dinyatakan dalam penelitian Satriawan dan Dewi (2020) bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dari penjelasan tersebut dan berdasarkan uraian teori dan tinjauan empiris dan dengan memperhatikan kerangka pemikiran dan model konseptual, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **3.2.3 Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

*Contingency Theory* menyatakan bahwa tidak ada suatu cara yang dapat diterapkan secara universal dan efektif penggunaannya untuk semua situasi, melainkan pada konteks atau kondisi tertentu (Otley, 1980). Teori ini menyatakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka ada variabel tertentu yang saling berinteraksi. Pendekatan kontijensi menunjukkan kemungkinan adanya variabel yang bertindak sebagai variabel intervening ataupun variabel moderating.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah menunjukkan hasil yang berbeda atau tidak konsisten mengenai hubungan variabel independen dan

variabel dependen, sehingga dalam penelitian ini *contingency theory* dijelaskan oleh penggunaan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi yang dimungkinkan dapat memperkuat pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pasolo et al. (2023) menyatakan bahwa SAP yang dimoderasi oleh komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sutisman et al. (2021) namun berbeda dengan hasil penelitian Wulandari (2014) dan Sorusai (2019) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran dan model konseptual, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Komitmen Organisasi Mampu Memoderasi Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **3.2.4 Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

*Contingency Theory* yang dikemukakan oleh Otley (1980) menyatakan bahwa tidak ada suatu cara yang tepat digunakan dalam semua kondisi namun akan terdapat variabel lain sebagai penentu yang saling berinteraksi dan selaras sehingga dapat memaksimalkan pencapaian tujuan. Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, apabila ditinjau dari *Contingency Theory* maka dibutuhkan variabel yang bertindak sebagai variabel moderasi ataupun intervening dalam memperkuat pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dalam penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu komitmen organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Jumardi et al. (2022) menyatakan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan itu, penelitian Satriawan dan Dewi (2020) menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran dan model konseptual, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Komitmen Organisasi Mampu Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.